

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka ditetapkan Peraturan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud, merupakan sub sistem dari Pengelolaan Keuangan Negara yang merupakan elemen pokok didalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah bagian dari Pemerintah Daerah yang telah diberi kewenangan untuk mengelola anggaran dan barang milik daerah, dengan demikian pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus sesuai aturan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, dan membuat pertanggung jawaban berupa Laporan Keuangan setiap berakhirnya Tahun Anggaran.

Untuk memperjelas Laporan Keuangan yang disampaikan, maka di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disampaikan informasi tentang ;

- o Penjelasan pos - pos dalam Laporan Keuangan.
- o Tingkat capaian target kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- o Informasi mengenai pos - pos asset dan kewajiban yang timbul.
- o Dasar penyusunan laporan.
- o Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun pelaporan.

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

#### *Maksud :*

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Keuangan OPD adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD pada tahun pelaporan, dan sebagai bahan masukan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### *Tujuan :*

Secara umum tujuan dari Laporan Keuangan OPD adalah untuk memberikan informasi tentang ; Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan OPD Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2013, tentang Perubahan ketiga atas peraturan Gubernur Jambi No. 57 Tahun 2011 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi.

## 1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

### BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

### BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD OPD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target

### BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang Telah ditetapkan

- BAB IV Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Entitas pelaporan keuangan OPD
  - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
  - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
  - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD
- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan OPD
  - 5.1 Rincian dan penjelasan pos-pos pelaporan Keuangan OPD
  - 5.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yang rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan menggunakan basis akrual
- BAB VI PENUTUP

## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

### 2.1 Ekonomi Makro

*Data tentang ekonomi makro tidak berada pada OPD Sekretariat DPRD Provinsi Jambi*

### 2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, dalam Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi dana dari APBD Provinsi Jambi sebesar **Rp. 121.462.930.255.-** yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung Rp. 48.988.694.835** dan **Belanja Langsung Rp. 72.474.235.420.-** dengan rincian seagai berikut ;

#### A. BELANJA TIDAK LANSUNG DEWAN

NO	URAIAN	PAGU
1.	Gaji Dewan	1.793.032.612
2.	Tunjangan Keluarga	233.063.025
3.	Tunjangan Jabatan	2.604.190.076
4.	Tunjangan Beras	195.968.520
5.	Tunjangan PPH	140.533.144
6.	Iuran Asuransi Kesehatan	52.077.708
7.	Uang Paket	153.688.500
8.	Tunjangan Panitia Musyawarah	44.676.675
9.	Tunjangan Komisi	104.334.750
10.	Tunjangan Panitia Anggaran	52.702.425
11.	Tunjangan Badan Kehormatan	14.713.875
12.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	86.945.625
13.	Belanja jaminan Kecelakaan Kerja	5.125.000
14.	Uang Jasa Pengabdian	655.200.000
15.	Belanja Jaminan Kematian	18.220.655
<b>JUMLAH A</b>		<b>6.154.472.590</b>

**B. BELANJA TIDAK LANGSUNG SEKRETARIAT**

NO	URAIAN	PAGU
1.	Gaji PNS	4.375.796.478
2.	Tunjangan Keluarga	406.930.991
3.	Tunjangan Jabatan	173.434.250
4.	Tunjangan Fungsional Umum	190.942.500
5.	Tunjangan Beras	182.607.030
6.	Tunjangan PPH	4.803.564
7.	Pembulatan Gaji	50.772
8.	Iuran Asuransi Kesehatan	109.722.231
9.	Tunjangan Perumahan DPRD	8.945.820.000
10.	Belanja jaminan Kecelakaan Kerja	7.731.612
11.	BPOP Pimpinan DPRD	360.000.000
12.	Belanja Jaminan Kematian	28.362.987
13.	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	2.536.875.000
14.	Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	10.774.585.500
15.	TPP	4.589.059.330
16.	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	10.147.500.000
<b>JUMLAH B</b>		<b>42.834.222.245</b>

**C. BELANJA LANGSUNG**

NO	URAIAN	JUMLAH
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>12.464.056.220</b>
1.	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	34.400.000
2.	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.678.425.200
3.	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	40.300.000
4.	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD	275.000.000
5.	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	480.600.000
6.	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.515.275.000
7.	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	452.896.750
8.	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.020.000.000
9.	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	545.633.100
10.	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	539.153.970
11.	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	70.595.000
12.	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	612.052.200
13.	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	4.488.375.000
14.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	711.350.000

<b>II</b>	<b>PROGRAM SARANA DAN PRASANA APARTUR</b>	<b>6.207.172.200</b>
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2.555.000.000
2.	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	190.000.000
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	612.700.000
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	360.250.000
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	198.600.000
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Dinas	156.445.000
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.419.177.200
	Rehabilitasi Sedang / Berat rumah jabatan	0
9.	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	715.000.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>1.907.600.000</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	1.907.600.000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>251.100.000</b>
1.	Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	251.100.000
2.	Kegiatan Rapat Koordinasi FORKOM Sekwan Se-Provinsi Jambi	0

<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DPRD</b>	<b>51.644.307.000</b>
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9.628.720.000
2.	Kegiatan Reses	4.133.600.000
3.	Kunker dan Peninjauan Lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.040.013.000
4.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	30.981.610.000
5.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif	3.220.210.000
6.	Publikasi Rapat-Rapat Paripurna DPRD Prov. Jambi	1.198.754.000
7.	Kegiatan Organisasi Pelayanan Keprotokolan, Informasi, Komunikasi, dan kehumasan bagi pimpinan dan Anggota DPRD	441.400.000
<b>JUMLAH C</b>		<b>72.474.235.420</b>

Dari total anggaran tersebut sampai pada akhir tahun anggaran 2019, terealisasi **Rp. 106.849.475.003,-** atau **88 %**, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. **14.613.455.252,- ( 12 % )**, sisa dari **Belanja Langsung** Rp. **8.114.351.238,- (11,20%)** sedangkan sisa dari **Belanja Tidak Langsung** Rp. **6.499.104.014 ( 13,27%)**

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD

Capaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2019, dari 5 Program yang terdiri 31 Kegiatan, secara keseluruhan capaian fisik sebesar 96,90 % dengan rincian sebagai berikut ;

Laporan Keuangan Tahun 2019

(Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan)

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN TARGET KINERJA	%
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar</b>	<b>94,35</b>
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan benda pos lainnya	100
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air / Listrik	Terlaksananya pembayaran telepon, air, listrik dan jasa lainnya	91,70
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100
4.	Kegiatan Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terjaminnya tingkat kesehatan Anggota DPRD dan keluarga	29,10
5.	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Terjaminnya barang/asset milim daerah	100
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya kesejahteraan bagi pengelola administrasi keuangan	100
8.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediaanya jasa kebersihan kantor	100
9.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100
10.	Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya baranga cetakan dan penggandaan keperluan kantor	100
11.	Kegiatan Penyediaan Intalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Terlaksananya pembelian alat-alat listrik dan elektronik	100
12.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Per – UU	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Per-UU	100
13.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pelayanan makanan dan minuman petugas dan tamu	100
14.	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM	100
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor</b>	<b>100</b>
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	100
2.	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas / Jabatan	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas	100
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100
4.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Tersedianya jasa pemeliharaan rumah dinas/jabatan	100
5.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perawatan gedung kantor	100
6.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan rumah dinas/jabatan	100
7.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase terpeliharanya peralatan gedung kantor	100
8.	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Persentase pemeliharaan rumah jabatan	0
9.	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan gedung	100

Laporan Keuangan Tahun 2019

(Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan)

<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>	<b>100</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Anggota dan Pegawai	100
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS</b>	<b>100</b>
1.	Kegiatan Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan SDM	100
2.	Kegiatan Rakor FORKOM Sekwan se-Provinsi Jambi	-	-
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD</b>	<b>Meningkatnya kapasitas lembaga DPRD</b>	<b>90,13</b>
1.	Kegiatan Pembahasan Ranperda Provinsi	Terlaksananya Pembahasan Ranperda Provinsi Jambi	91,27
2.	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses	66,70
3.	Kegiatan Kunker dan Peninjauan Lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya kegiatan Kunker dan Peninjauan Lapangan sebagai bahan masukan/informasi pembangunan dan terwujudnya fungsi pengawasan	100
4.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	96,58
5.	Pembuatan Ranperda Inisiatif	Terlaksananya Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD	77,36
6.	Kegiatan Publikasi Rapat-rapat Paripurna DPRD	Terlaksananya Publikasi Rapat-rapat Paripurna DPRD	100
7.	Kegiatan Organisasi Pelayanan Keprotokolan, informasi, Komunikasi, & Kehumasan bagi Pimpinan & Anggota DPRD	Tersedianya hak keprotokolan dan kehumasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100

### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Jambi meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

#### A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO	URAIAN	PAGU	REALIASASI	%	SILPA
<b>I.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG DEWAN</b>				
1.	Gaji Dewan	1.793.032.612	1.727.550.000	96,35	65.482.612
2.	Tunjangan Keluarga	233.063.025	214.950.000	92,22	18.113.025
3.	Tunjangan Jabatan	2.604.190.076	2.481.457.500	95,28	122.732.576
4.	Tunjangan Beras	195.968.520	159.677.100	81,48	36.291.420
5.	Tunjangan PPH	140.533.144	23.490.810	16,71	117.042.334
6.	Iuran Asuransi Kesehatan	52.077.708	48.510.900	93,15	3.566.808
7.	Uang Paket	153.688.500	147.990.000	96,29	5.698.500
8.	Tunjangan Panitia Musyawarah	44.676.675	38.780.250	86,80	5.896.425
9.	Tunjangan Komisi	104.334.750	85.774.000	82,21	18.560.750
10.	Tunjangan Panitia Anggaran	52.702.425	42.434.250	80,51	10.268.175
11.	Tunjangan Badan Kehormatan	14.713.875	10.113.250	68,73	4.600.625
12.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	86.945.625	21.510.750	24,74	65.434.875
13.	Belanja jaminan Kecelakaan Kerja	5.125.000	3.546.360	69,19	1.578.640
14.	Uang Jasa Pengabdian	655.200.000	649.650.000	99,15	5.550.000
15.	Belanja Jaminan Kematian	18.220.655	10.123.740	55,56	8.096.915
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.154.472.590</b>	<b>5.665.558.910</b>	<b>92,05</b>	<b>488.913.680</b>

Laporan Keuangan Tahun 2019

(Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan)

NO	URAIAN	PAGU	REALIASASI	%	SILPA
<b>II.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG TIDAK SEKRETRIAT</b>				
1.	Gaji PNS	4.375.796.478	3.801.186.700	86,86	574.609.778
2.	Tunjangan Keluarga	406.930.991	324.605.452	79,76	82.325.539
3.	Tunjangan Jabatan	173.434.250	166.460.000	95,98	6.974.250
4.	Tunjangan Fungsional Umum	190.942.500	156.525.000	81,97	34.417.500
5.	Tunjangan Beras	182.607.030	172.938.960	94,70	9.668.070
6.	Tunjangan PPH	4.803.564	4.595.118	95,66	208.446
7.	Pembulatan Gaji	50.772	46.446	91,47	4.326
8.	Iuran Asuransi Kesehatan	109.722.231	105.949.925	96,56	3.772.306
9.	Tunjangan Perumahan DPRD	8.945.820.000	8.653.351.500	96,73	292.468.500
10.	Belanja jaminan Kecelakaan Kerja	7.731.612	7.158.205	92,58	573.407
11.	BPOP Pimpinan DPRD	360.000.000	321.000.000	89,16	39.000.000
12.	Belanja Jaminan Kematian	28.362.987	24.973.052	88,04	3.389.935
13.	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	2.536.875.000	1.635.000.000	64,44	901.875.000
14.	Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	10.774.585.500	8.140.500.000	75,55	2.634.085.500
15.	TPP	4.589.059.330	3.649.741.553	79,53	939.317.777
16.	Belanja Penunjang Komunikasi DPRD	10.147.500.000	9.660.000.000	95,19	487.500.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>42.834.222.245</b>	<b>36.824.031.911</b>	<b>85,96</b>	<b>6.010.190.334</b>

**B. BELANJA LANGSUNG**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SILPA
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12.464.056.220</b>	<b>9.118.644.063</b>	<b>73,16</b>	<b>3.345.412.157</b>
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.400.000	17.190.000	49,97	17.210.000
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air / Listrik	1.678.425.200	1.268.374.385	75,57	410.050.815
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.300.000	37.415.000	92,84	2.885.000
4.	Kegiatan Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	275.000.000	27.766.500	10,10	247.233.500
5.	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	480.600.000	408.244.532	84,94	72.355.468
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.515.275.000	925.710.175	61,09	589.564.825
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	452.896.750	396.070.500	87,45	56.826.250
8.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.020.000.000	1.009.117.800	98,93	10.882.200
9.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	545.633.100	397.344.300	72,82	148.288.800
10.	Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	539.153.970	419.242.000	77,76	119.911.970
11.	Kegiatan Penyediaan Intalasi Listrik dan Penerangan Kantor	70.595.000	70.315.000	99,60	280.000
12.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Per – UU	612.052.200	525.056.950	85,79	86.995.250
13.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	4.488.375.000	2.907.192.463	64,77	1.581.182.537
14.	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	711.350.000	709.604.458	99,75	1.745.542
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>6.207.172.200</b>	<b>5.841.283.600</b>	<b>94,11</b>	<b>365.888.600</b>
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	2.555.000.000	2.513.000.000	98,36	42.000.000
2.	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas / Jabatan	190.000.000	73.649.500	38,76	116.350.500
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	612.700.000	586.918.000	95,79	25.782.000
4.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	360.250.000	348.342.000	96,69	11.908.000
5.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	198.600.000	195.496.000	98,44	3.104.000
6.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	156.445.000	122.054.800	78,02	34.390.200
7.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.419.177.200	1.319.282.300	92,96	99.894.900
8.	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan				

9.	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	715.000.000	682.541.000	95,46	32.459.000
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>1.907.600.000</b>	<b>1.608.563.500</b>	<b>84,32</b>	<b>299.036.500</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	1.907.600.000	1.608.563.500	84,32	299.036.500
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>251.100.000</b>	<b>133.356.200</b>	<b>53,11</b>	<b>117.743.800</b>
1.	Kegiatan Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	251.100.000	133.356.200	53,11	117.743.800
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD</b>	<b>51.644.307.000</b>	<b>47.658.036.819</b>	<b>92,28</b>	<b>3.986.270.181</b>
1.	Kegiatan Pembahasan Ranperda Provinsi	9.628.720.000	8.787.981.875	91,27	840.738.125
2.	Kegiatan Reses	4.133.600.000	3.810.460.000	92,18	323.140.000
3.	Kegiatan Kunjuran dan Peninjauan Lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.040.013.000	1.162.541.000	56,99	877.472.000
4.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	30.981.610.000	29.920.762.756	96,58	1.060.847.244
5.	Pembuatan Ranperda Inisiatif	3.220.210.000	2.491.024.330	77,36	729.185.670
6.	Kegiatan Publikasi Rapat-rapat Paripurna DPRD	1.198.754.000	1.197.055.000	99,86	1.699.000
7.	Kegiatan Organisasi Pelayanan Keprotokolan, Informasi, Komunikasi, Kehumasan bagi Pimpinan & anggota DPRD	441.400.000	288.211.858	65,29	153.188.142
<b>JUMLAH</b>		<b>72.474.235.420</b>	<b>64.359.884.182</b>	<b>88,80</b>	<b>8.114.351.238</b>

## REKAPITULASI

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SILPA
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>48.988.694.835</b>	<b>42.489.590.821</b>	<b>86,74</b>	<b>6.499.104.014</b>
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>72.474.235.420</b>	<b>64.359.884.182</b>	<b>88,80</b>	<b>8.114.351.238</b>
<b>JUMLAH A+B</b>		<b>121.462.930.225</b>	<b>106.849.475.003</b>	<b>88,00</b>	<b>14.613.455.252</b>

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Dalam pencapaian target realisasi anggaran tahun 2019, untuk Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

secara umum tidak mengalami hambatan maupun kendala yang berarti, walau tingkat capaian realisasi keuangan hanya 88,00 %, hal ini dikarenakan :

Pada **Belanja Tidak Langsung** terdapat sisa sebesar Rp. **6.499.104.014,- (13,26%)**, ini terjadi karena ;

- 1). *Adanya Anggota DPRD Provinsi Jambi yang terkena kasus hukum dan meninggal dunia sehingga harus dilakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) sehingga hak – hak keuangan anggota DPRD terjadi SiLPA*
- 2). *Tunjangan Reses 1 Kali tidak diberikan karena adanya aturan yang melarang terhadap masa berakhirnya Pengabdian Anggota DPRD masa Jabatan 2014 – 2019 ke Periode masa Jabatan 2019 - 2024*
- 3). *Alokasi anggaran untuk tunjangan transportasi yang berlebih, dialokasikan 17 juta, yang dibayarkan sesuai aturan 13,5 juta / perorang / bulan*
- 4). *Mutasi PNS, yang mengakibatkan alokasi anggaran untuk TPP menjadi berlebih* Sedangkan pada **Belanja Langsung** terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **8.114.351.238,- (11,20%)** hal ini disebabkan ;

- *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat silpa Rp. 3.345.412.157,-. Hal ini terjadi penghematan ( contoh, penghematan jasa komunikasi, listrik, air serta pemeliharaan lainnya, dan adanya Pimpinan DPRD tidak menggunakan belanja rumah tangga, dan fasilitas medical checkup )*
- *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat silpa sebesar Rp. 365.888.600,- hal ini terjadi adanya sisa dari pengadaan kendaraan pimpinan, dan penghematan dari pemeliharaan rumah jabatan dan gedung kantor dan pemeliharaan peralatan rumah jabatan dan gedung kantor*
- *Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdapat silpa Rp. 299.036.500,- hal ini terjadi sisa dari hasil lelang pengadaan pakaian dinas*
- *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat silpa sebesar Rp. 117.743.800 hal ini terjadi adanya penghematan pada pelaksanaan kegiatan bimtek*
- *Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD terdapat silpa sebesar Rp. 3.986.270.181,- hal terjadi karena adanya penghematan dan*

terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena regulasi seperti ;

- Adanya ranperda yang tidak terselesaikan karena peralihan dari anggota DPRD periode masa jabatan 2014 – 2019 ke Anggota DPRD periode masa jabatan 2019 – 2024 pada masa akhir tahun
- Pelaksanaan Reses ke 2 yang tidak boleh dilaksanakan menurut peraturan karena peralihan dari anggota DPRD periode masa jabatan 2014 – 2019 ke Anggota DPRD periode masa jabatan 2019 – 2024
- Penghematan yang dilakukan pada biaya perjalanan dinas kunker, dan kegiatan lainnya
- Pelaksanaan Bimtek Dalam Daerah tidak dilaksanakan karena masalah waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan karena transisi penggantian anggota DPRD periode masa jabatan 2014 – 2019 ke Anggota DPRD periode masa jabatan 2019 – 2024
- Penghematan dari kegiatan biaya perjalanan dinas untuk perda inisiatif
- Adanya penghematan biaya penginapan, karena tidak semua Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas menggunakan SPJ dengan bill hotel, melainkan memilih SPJ tanpa bill yakni 30 % dari plafon sesuai dengan Pergub tentang perjalanan dinas.
- Beberapa Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses dikarenakan kondisi kesehatan dan lainnya.
- Adanya Ranperda yang masuk dalam Prolegda Provinsi Jambi Tahun 2019, namun tidak dibahas secara menyeluruh sehingga kegiatan yang merupakan ikutan tidak dapat dilaksanakan.

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

Sekretariat DPRD Provinsi Jambi salah satu perangkat daerah yang mengelola sebagian Urusan Pemerintahan yang sekaligus pengguna anggaran daerah (APBD), dan pengguna barang dan jasa wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada entitas pelaporan secara periodik yang berupa ;

- Laporan Realisasi Anggaran.
- Neraca.
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk)

Laporan Keuangan tersebut disampaikan oleh entitas pelaporan secara berjenjang dari unit terendah sampai kepada unit tertinggi, dan entitas pelaporan yang disampaikan adalah ;

- Entitas yang dibiayai oleh APBD.
- Entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat.
- Entitas tersebut membuat pertanggung jawaban, baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Oleh karena itu entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kepala Daerah Provinsi, dan dalam pelaksanaannya Kepala Daerah sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.

### 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Dalam penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Jambi menggunakan basis kas untuk belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual (*Cash*

*basis toward accrual*) untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas yang diartikan adalah transaksi atau kejadian ekonomi yang diakui ketika kas diterima atau dibayarkan, sedangkan basis akrual diartikan adalah transaksi atau kejadian ekonomi yang diakui pada saat diperoleh (*earned*) atau pada saat terjadi (*Incured*) tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dibayarkan.

#### 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Untuk menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana), dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana, dan informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan sebagaimana dimaksud menggambarkan nilai perolehan historis, yaitu aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

#### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD

Kebijakan akuntansi yang dipilih entitas untuk menyusun laporan keuangan adalah kebijakan akuntansi yang diyakini entitas pemerintah daerah paling sesuai untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam kebijakan akuntansi pada penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan ;

- Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.
- Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

### 5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan OPD

Alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2019 sebelum APBD Perubahan sebesar Rp. 113.800.357.225,- dan setelah APBD Perubahan senilai Rp. 121.462.930.255,- sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 7.662.573.030,- ( 6,73 % ).

Dari jumlah anggaran tersebut diperuntukkan untuk Belanja Tidak Langsung ( Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai ASN Sekretariat DPRD Provinsi Jambi ) dan Belanja Langsung untuk 5 (lima) Program dengan 31 Kegiatan, dengan realisasi keuangan keseluruhan baik dari Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung sampai dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 106.849.475.003,- atau 88 % dan realisasi fisik sebesar 96,90 % dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp. 14.613.455.252,- ( 12,03% ), secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut ;

#### A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO	URAIAN	PAGU	REALIASASI	%	SILPA
<b>I.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG DEWAN</b>				
1.	Gaji Dewan	1.793.032.612	1.727.550.000	96,35	65.482.612
2.	Tunjangan Keluarga	233.063.025	214.950.000	92,22	18.113.025
3.	Tunjangan Jabatan	2.604.190.076	2.481.457.500	95,28	122.732.576
4.	Tunjangan Beras	195.968.520	159.677.100	81,48	36.291.420
5.	Tunjangan PPH	140.533.144	23.490.810	16,71	117.042.334
6.	Iuran Asuransi Kesehatan	52.077.708	48.510.900	93,15	3.566.808
7.	Uang Paket	153.688.500	147.990.000	96,29	5.698.500
8.	Tunjangan Panitia Musyawarah	44.676.675	38.780.250	86,80	5.896.425
9.	Tunjangan Komisi	104.334.750	85.774.000	82,21	18.560.750
10.	Tunjangan Panitia Anggaran	52.702.425	42.434.250	80,51	10.268.175
11.	Tunjangan Badan Kehormatan	14.713.875	10.113.250	68,73	4.600.625

Laporan Keuangan Tahun 2019

(Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan)

12.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	86.945.625	21.510.750	24,74	65.434.875
13.	Belanja jaminan Kecelakaan Kerja	5.125.000	3.546.360	69,19	1.578.640
14.	Uang Jasa Pengabdian	655.200.000	649.650.000	99,15	5.550.000
15.	Belanja Jaminan Kematian	18.220.655	10.123.740	55,56	8.096.915
<b>JUMLAH</b>		<b>6.154.472.590</b>	<b>5.665.558.910</b>	<b>92,05</b>	<b>488.913.680</b>

NO	URAIAN	PAGU	REALIASASI	%	SILPA
<b>II.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG SEKRETRIAT</b>				
1.	Gaji PNS	4.375.796.478	3.801.186.700	86,86	574.609.778
2.	Tunjangan Keluarga	406.930.991	324.605.452	79,76	82.325.539
3.	Tunjangan Jabatan	173.434.250	166.460.000	95,98	6.974.250
4.	Tunjangan Fungsional Umum	190.942.500	156.525.000	81,97	34.417.500
5.	Tunjangan Beras	182.607.030	172.938.960	94,70	9.668.070
6.	Tunjangan PPH	4.803.564	4.595.118	95,66	208.446
7.	Pembulatan Gaji	50.772	46.446	91,47	4.326
8.	Iuran Asuransi Kesehatan	109.722.231	105.949.925	96,56	3.772.306
9.	Tunjangan Perumahan DPRD	8.945.820.000	8.653.351.500	96,73	292.468.500
10.	Belanja jaminan Kecelakaan Kerja	7.731.612	7.158.205	92,58	573.407
11.	BPOP Pimpinan DPRD	360.000.000	321.000.000	89,16	39.000.000
12.	Belanja Jaminan Kematian	28.362.987	24.973.052	88,04	3.389.935
13.	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	2.536.875.000	1.635.000.000	64,44	901.875.000
14.	Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	10.774.585.500	8.140.500.000	75,55	2.634.085.500
15.	TPP	4.589.059.330	3.649.741.553	79,53	939.317.777
16.	Belanja Penunjang Komunikasi DPRD	10.147.500.000	9.660.000.000	95,19	487.500.000
<b>JUMLAH</b>		<b>42.834.222.245</b>	<b>36.824.031.911</b>	<b>85,96</b>	<b>6.010.190.334</b>

## B. BELANJA LANGSUNG

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SILPA
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12.464.056.220</b>	<b>9.118.644.063</b>	<b>73,16</b>	<b>3.345.412.157</b>
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.400.000	17.190.000	49,97	17.210.000
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air / Listrik	1.678.425.200	1.268.374.385	75,57	410.050.815
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.300.000	37.415.000	92,84	2.885.000
4.	Kegiatan Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	275.000.000	27.766.500	10,10	247.233.500
5.	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	480.600.000	408.244.532	84,94	72.355.468
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.515.275.000	925.710.175	61,09	589.564.825
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	452.896.750	396.070.500	87,45	56.826.250
8.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.020.000.000	1.009.117.800	98,93	10.882.200
9.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	545.633.100	397.344.300	72,82	148.288.800
10.	Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	539.153.970	419.242.000	77,76	119.911.970
11.	Kegiatan Penyediaan Intalasi Listrik dan Penerangan Kantor	70.595.000	70.315.000	99,60	280.000
12.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Per - UU	612.052.200	525.056.950	85,79	86.995.250
13.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	4.488.375.000	2.907.192.463	64,77	1.581.182.537
14.	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	711.350.000	709.604.458	99,75	1.745.542
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>6.207.172.200</b>	<b>5.841.283.600</b>	<b>94,11</b>	<b>365.888.600</b>
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	2.555.000.000	2.513.000.000	98,36	42.000.000

Laporan Keuangan Tahun 2019

(Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan)

2.	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas / Jabatan	190.000.000	73.649.500	38,76	116.350.500
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	612.700.000	586.918.000	95,79	25.782.000
4.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	360.250.000	348.342.000	96,69	11.908.000
5.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	198.600.000	195.496.000	98,44	3.104.000
6.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	156.445.000	122.054.800	78,02	34.390.200
7.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.419.177.200	1.319.282.300	92,96	99.894.900
8.	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan				
9.	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	715.000.000	682.541.000	95,46	32.459.000
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<b>1.907.600.000</b>	<b>1.608.563.500</b>	<b>84,32</b>	<b>299.036.500</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	1.907.600.000	1.608.563.500	84,32	299.036.500
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>251.100.000</b>	<b>133.356.200</b>	<b>53,11</b>	<b>117.743.800</b>
1.	Kegiatan Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	251.100.000	133.356.200	53,11	117.743.800
V.	Program Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD	<b>51.644.307.000</b>	<b>47.658.036.819</b>	<b>92,28</b>	<b>3.986.270.181</b>
1.	Kegiatan Pembahasan Ranperda Provinsi	9.628.720.000	8.787.981.875	91,27	840.738.125
2.	Kegiatan Reses	4.133.600.000	3.810.460.000	92,18	323.140.000
3.	Kegiatan Kunker dan Peninjauan Lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.040.013.000	1.162.541.000	56,99	877.472.000
4.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	30.981.610.000	29.920.762.756	96,58	1.060.847.244
5.	Pembuatan Ranperda Inisiatif	3.220.210.000	2.491.024.330	77,36	729.185.670
6.	Kegiatan Publikasi Rapat-rapat Paripurna DPRD	1.198.754.000	1.197.055.000	99,86	1.699.000
7.	Kegiatan Organisasi Pelayanan Keprotokolan, Informasi, Komunikasi, Kehumasan bagi Pimpinan & anggota DPRD	441.400.000	288.211.858	65,29	153.188.142
<b>JUMLAH</b>		<b>72.474.235.420</b>	<b>64.359.884.182</b>	<b>88,80</b>	<b>8.114.351.238</b>

## 5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini hanya untuk pos-pos yang terdapat dalam Neraca per 31 Desember 2019, dengan pembandingan Neraca per 31 Desember 2018 yang terdiri dari :

KODE REK	URAIAN	2018	2019
1.	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas	0,00	0,00
1.1.2	Investasi jangka pendek	0,00	0,00
1.1.3	Piutang	0,00	0,00
1.1.4	Piutang lain-lain	0,00	0,00
1.1.5	Persediaan	5.921.400,00	4.103.500,00
1.1.6	Penyisihan piutang	0,00	0,00
1.1.7	Biaya dibayar dimuka	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	5.921.400,00	4.103.500,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi non permanen	0,00	0,00
1.2.2	Investasi permanen	0,00	0,00
1.2.3	Penyisihan piutang dana bergulir	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	0,00	0,00
1.3.2	Peralatan dan mesin	37.937.940.834,90	39.830.376.104,90
1.3.3	Gedung dan bangunan	30.002.177.152,33	33.006.915.152,33
1.3.4	Jalan, jaringan dan instalasi	17.500.000,00	17.500.000,00
1.3.5	Aset tetap lainnya	214.551.540,00	238.861.540,00
1.3.6	Konstruksi dalam pekerjaan	15.930.000,00	49.021.000,00
1.3.7	Akumulasi penyusutan	(30.384.606.448,48)	(33.843.600.792,32)
	JUMLAH ASET TETAP	37.803.493.078,39	39.299.073.004,91
1.4	DANA CADANGAN		
1.4.1	Dana cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.1	Tagihan piutang penjualan angsuran	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0,00	0,00
1.5.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00
1.5.4	Aset tidak berwujud	0,00	0,00
1.5.5	Aset lain-lain	2.008.527.889,00	3.679.949.732,00
1.5.6	Akumulasi amortisasi	0,00	0,00

1.5.7	Akumulasi penyusutan aset lainnya	(1.790.383.389,00)	(3.243.647.515,33)
	JUMLAH ASET LAINNYA	218.144.500,00	436.302.216,67
	JUMLAH ASET	38.027.558.978,39	39.739.478.721,58
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga(PFK)	0,00	0,00
2.1.2	Utang bunga	0,00	0,00
2.1.3	Utang pajak	0,00	0,00
2.1.4	Bagian lancar utang jangka panjang	0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan di terima dimuka	0,00	0,00
2.1.6	Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00
2.1.9	Utang kepada pihak ketiga	0,00	0,00
2.1.10	Utang belanja jasa kantor	88.412.465,00	57.140.984,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	88.412.465,00	57.140.984,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2.2.1	Utang dalam negeri	0,00	0,00
2.2.2	Utang luar negeri	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	88.412.465,00	57.140.984,00
3	EKUITAS DANA		
	EKUITAS DANA	37.939.370.513,39	39.779.811.111,78
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	38.027.558.978,39	39.836.952.095,78

Berdasarkan data neraca diatas, maka dapat dilihat bahwa total Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 39.836.952.095,78 terjadi kenaikan Rp 1.711.919.743,19 (4,5%) dibandingkan tahun anggaran 2018, yakni Rp. 38.027.558.978,39. Untuk lebih rincinya masing – masing pos dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Nilai Persediaan tahun 2019 sebesar Rp. 4.523.900,- adalah merupakan persediaan ATK, dan terjadi penurunan sebesar 1.817.900,00 ( 30,70% ) dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 5.921.400, hal ini sesuai dengan nilai sisa persediaan ATK yang ada pada saat stock of name per 31 Desember 2019.
2. Nilai Peralatan dan Mesin tahun 2019 terjadi penambahan dari pembelian sebesar Rp. 3.162.910.270,00 dengan rincian sbb ;
  - a. Pompa air Rp. 23.250.000
  - b. Kendaraan Roda Empat untuk Pimpinan Rp. 2.513.000.000

c. Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Banner Rp. 605.557.500

d. Mutasi Rp. 21.102.770

Sehingga nilai Peralatan dan Mesin sebelum Reklasifikasi sebesar Rp. 41.100.851.104,90, dan pada tahun yang sama telah dilakukan reklasifikasi sebesar sebesar Rp. 1.270.475.000 untuk ;

a. Mesin Genset Rp. 1.218.800.000

b. Kendaraan Roda 2 Rp. 29.900.000

c. Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 21.775.000

Sehingga Nilai Asset Peralatan dan Mesin setelah reklasifikasi sebesar Rp. 39.830.376.104,90

3. Nilai Gedung dan Bangunan tahun 2019 sebesar Rp. 33.006.915.152,33 terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.004.738.000,- ( 10,01% ) dibandingkan dari tahun 2018 sebesar Rp. 30.002.177.152,33, karena adanya tambahan dari belanja modal, mutasi dan nilai perencanaan / Kontruksi Dalam Pengerjaan ( KDP ) dengan rincian sebagai berikut ;

a. Pembuatan Tempat Wudhu Musollah Rp. 424.040.000

b. Rehab Taman Air Mancur Rp. 209.480.000

c. Mutasi Gedung Ex Pertanian Rp. 2.355.288.000

d. Perencanaan Relif ( KDP 2018 ) Rp. 15.930.000

4. Nilai Asset tetap lainnya Rp. 238.861.540,- bertambah Rp. 24.310.000,- ( 11,33% ) disbanding tahun 2018 sebesar Rp. 214.551.540,- karena adanya belanja barang kebudayaan / Photo Mantan Ketua DPRD

5. Kontruksi Dalam Pengerjaan ( KDP ) dalam tahun 2019 berupa perencanaan renovasi relief sejarah Jambi sebesar Rp. 49.021.000.-

6. Akumulasi penyusutan asset tahun 2019 – sebesar Rp. 33.843.600.792,32 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.458.994.343,84 ( 11,38% ) dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 30.384.606.448,84

7. Asset lainnya senilai Rp. 3.679.949.732,- adalah merupakan nilai asset rusak berat

8. Besaran Kewajiban jangka pendek adalah merupakan utang untuk belanja jasa kantor berupa pembayaran rekening listrik, air, telepon untuk bulan Desember 2019 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2020 yang nilainya sebesar Rp. 57.140.984.-

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dalam pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2018, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, tidak mengalami hambatan yang berarti, hal ini terlihat dari tingkat capaian keuangan untuk seluruh Belanja adalah 88 % dan fisik 96,90 %, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran ( SiLPA ) sebesar 12 % yang tidak tercapai, hal tersebut diakibatkan akumulasi dari adanya penghematan di beberapa kegiatan serta tidak terlaksananya beberapa kegiatan sehingga berimplikasi kepada tingkat capaian kegiatan Sekretariat DPRD secara menyeluruh.

Namun demikian Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, selalu berupaya melakukan kerjasama dan koordinasi yang maksimal, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal serta melakukan perbaikan sistem kerja yang lebih baik.

Demikian LK dan Catatan atas Laporan Keuangan OPD Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019 disampaikan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban OPD untuk dapat dijadikan bahan/materi dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019.